



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MUHAMMAD FAISAL**
2. Jabatan : **KETUA**
3. NHK : **448810**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 875.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 119 m2/38 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 208.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 868 m2/247 m2 di KAB / KOTA KARIMUN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 308.000.000
3. Tanah Seluas 588 m2 di KAB / KOTA KARIMUN, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
4. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA KOTA DUMAI , HASIL SENDIRI Rp. 34.000.000
5. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA KOTA DUMAI , HASIL SENDIRI Rp. 34.000.000
6. Tanah Seluas 252 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 27.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 119 m2/38 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 208.000.000
8. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HASIL SENDIRI Rp. 28.000.000
9. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 12.000.000

1. MOTOR, HONDA A1F02N36M1 A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 31.000.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	247.282.626
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.165.282.626
III. HUTANG	Rp.	395.944.385
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	769.338.241

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.